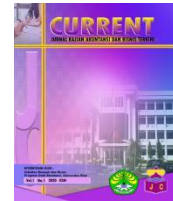




CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



**DAMPAK RETRIBUSI DAERAH, PERAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
 PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI ERA PANDEMI COVID-19**

Lesi Hertati^{1*}, Lilis Puspitawati², Rilla Gantino³, Meifida Ilyas⁴

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer, Bandung

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul, Jakarta

⁴Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Satya Negara, Jakarta

*E-mail: hertatilesi@yahoo.co.id

Keywords

Regional Levies, Role of Accounting Information Systems, Regional Original Financial Income

Article informations

Received:

2021-10-13

Accepted:

2021-10-30

Available Online:

2021-12-08

Abstract

This study aims to examine the effect of regional levies and the use of accounting information systems on Regional Original Income during the Covid 19 pandemic. This research was conducted on the Musi Banyuasin Regional Government using a purposive sampling technique, namely selecting the OPD that collects regional retribution. Respondents in this study were the State Civil Apparatus in the accounting sub-section 23 people and 23 people in informatics. Data was collected by sending questionnaires directly to respondents. Data analysis was performed using Structural Equation Modeling (SEM) with Smart PLS 3.0. The results showed that the regional retribution did not have a significant effect on increasing PAD, but the accounting information system had a significant effect on increasing the local revenue of Musi Banyuasin Regency. The results of this study contribute to the government in increasing PAD can be done by utilizing accounting information systems.

PENDAHULUAN

Pademi Covid-19 terjadi secara global diseluruh dunia dan menyebar secara cepat berdampak beberapa sektor seperti perdagangan, Kesehatan, termasuk juga sektor perekonomian. Bencana Covid 19 juga menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan pemerintah. Terjadinya penurunan penerimaan dari sektor pajak maupun non pajak menyebabkan pemerintah harus melakukan perencanaan ulang terhadap keuangannya. Menurut Mulyani (2021) wabah Covid 19 membuat penerimaan negara turun, namun belanja negara di daerah meningkat. Dalam APBN 2020, realisasi penerimaan negara mencapai Rp1.647,7 triliun atau mencapai 96,9% dari anggaran pendapatan tahun anggaran 2020. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum Covid yaitu tahun anggaran 2019, penerimaan



mengalami penurunan sebesar Rp312,8 triliun, atau 15,9%.

Pada pemerintah daerah penurunan pendapatan hampir terjadi pada semua pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi. Penelitian Astuti et al (2021) menunjukkan bahwa pada Provinsi Lampung terdapat penurunan PAD pada tahun 2020. Begitu juga penelitian Ariyanti dan Widiyanto (2020) menunjukkan terjadinya penurunan penerimaan daerah di kabupaten Sidoarjo di masa pandemi Covid 19. Hanrnojoyo wali kota Palembang menyampaikan laporan keuangan pemerintah Kota Pelamebang, yaitu terjadinya penurunan perolehan pajak perolehan pajak kota Palembang pada tahun 2020 yaitu dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,2 triliun (Gatra.com, 2020).

Selain pada pemerintah diatas, Kabupaten Musi Banyuasin juga menhalami penurunan pendapatan. Pada tahun 2019 total PAD Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar Rp.5.280.650.358 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 582.432.013 (Sumber: Dispenda Kab. Muba, Dalam Fery 2021). Data tersebut menunjukkan terjadi penurunan yang sangat signifikan PAD Kabupaten Musi Banyuasin yaitu sekitar 4,698,218,345 atau sekitar 89%. Walaupun pemerintah Musi Banyuasin melakukan realokasi dan refocusing anggaran yang mengutamakan penanggulangan bencana Covid 19, namun pemerintah juga berupaya dengan maksimal dalam penanggulangi wabah covid-19, misalnya dengan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan pendapatan retribusi.

Gantino *et al* (2021) menyatakan bahwa retribusi dan pajak daerah merupakan bagian integral dari upaya pendapatan keuangan asli daerah yang merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena retribusi daerah adalah otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah retribusi daerah dan lain-lain. Namun demikian harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah. Hal ini tercermin dari indeks kemampuan rutin (IKR) dari masing-masing daerah di seluruh Indonesia yang masih sangat rendah. Pendapatan asli daerah dari masing-masing daerah di seluruh Indonesia belum mampu membiayai pengeluaran rutin. Karena itu otonomi daerah dan juga pemerintah dan pembangunan daerah dapat diwujudkan hanya apabila disertai otonomi keuangan yang efektif.

Solikin (2008) mengatakan bahwa retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa-jasa negara yang diberikan secara langsung kepada pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan retribusi daerah didasarkan pada kinerja sehingga pembayaran dapat dilakukan berulang-ulang. Siapa pun yang menikmati layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan pungutan. Sulaiman (2018) menyatakan retribusi daerah diartikan sebagai

pungutan daerah sebagai pembayaran, pemakaian atau jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan hal tersebut, dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk sementara berdampak kurang menguntungkan bagi penerimaan daerah yang menyebabkan terpangkasnya banyak sektor pajak dan retribusi daerah. Kemudian munculnya pademi Covid-19 sehingga menyebabkan melemahnya sumber penghasilan pajak daerah akibat wabah Corona yang melanda dunia sehingga berdampak krisis ekonomi sangat berpengaruh terhadap pungutan pajak dan retribusi daerah

Hasil penelitian Hertati *et al* (2020), mengatakan bahwa retribusi pasar kabupaten di banyak daerah tingkat II di Indonesia menjadi sumber PAD yang cukup berarti dan turut menentukan besarnya kemandirian sesuatu daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, untuk itu upaya-upaya peningkatan penerimaan daerah harus dioptimalkan. Penelitian Aseria (2015) dan Ramadhan (2019) menemukan bahwa pendapatan retribusi merupakan unsur yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah sangat penting dalam mengelola dana perimbangan keuangan pusat dan daerah berintikan pemberdayaan masyarakat, penumbuhan prakarsa dan kreativitas dan pengembangan peran guna pengambilan keputusan. Dengan demikian daerah-daerah tersebut mempunyai kewenangan dan keleluasaan yang lebih besar untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam mengelola retribusi dan pajak daerah merupakan bagian integral dari upaya pendapatan keuangan asli daerah, (Cheng *et al*, 2002: Christiaens, & Van, 2003: Defitri, 2018).

Penelitian Annisa (2017) menemukan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan bagian terintegrasi dalam upaya mengelola pendapatan keuangan asli daerah. Sistem informasi yang baik berguna dalam mengelola data lebih akurat guna mempercepat pelayanan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh retribusi daerah dan implementasi sistem informasi akuntansi terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu Kabupaten yang berada pada Provinsi Palembang yang termasuk pada daerah yang kaya. Semenjak tahun 2019, Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD, diantaranya melakukan inovasi yaitu dengan membentuk E Retribusi (Kusnadi, 2019). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam meningkatkan PAD.



PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Keuangan Asli Daerah Era Pandemi Covid-19

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang dengan leluasa tanpa intervensi pemerintah pusat dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah, kemasyarakatan daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari : hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Hertati & safkaur, 2020: Nunuy, & Azwari, 2015).

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang tertuang didalam undang-undang dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat (Mardiasmo,2007: Nazier,2009: Raharja, & Wachid, 2017).

Sulistyo (2018) berpendapat bahwa Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah, dan pada umumnya retribusi daerah lebih dominan. Sumbangan penerimaan Asli Daerah terhadap total penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah rendah, karena upaya merealisasikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak didasarkan pada potensi Pendapatan Asli Daerah tetapi di targetkan berdasarkan realisasi sebelumnya. Riset Aseria (2015); Ramadhan (2019) menemukan bahwa pendapatan retribusi merupakan unsur yang signifikan dalam meningkatka pendapatan asli daerah.

H1: Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Keuangan Asli Daerah Era Pademi Covid-19.

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pendapatan Keuangan Asli Daerah Era Pandemi Covid-19

Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling dependen yang membentuk suatu entitas kesatuan. Sistem informasi akuntansi adalah pengumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang didisain untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Sistem informasi akuntansi adalah struktur yang dipersatukan di dalam suatu entitas atau perusahaan yang terdiri dari sumberdaya fisik dan komponen lainnya yang

mengubah data ekonomis menjadi informasi akuntansi yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan informasi berbagai pengguna, (Zarkasyi, 2008: Laudon, & Laudon, 2014).

Sistem informasi akuntansi dapat dianalisa berdasarkan tiga basis yaitu: (1) *Information Scope*, yaitu mempertimbangkan informasi keuangan dan non-keuangan serta informasi external dan internal yang berguna untuk memprediksi kejadian masa depan. (2) *Timeliness*, yaitu kemampuan Sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan informasi dengan menyediakan laporan sistematis kepada pengguna (3) *Agregation of Information*, yaitu sebagai alat yang mengumpulkan dan mengikhtisarkan informasi dalam periode tertentu.

Peran sistem informasi akuntansi guna peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Dengan mengetahui isu-isu sistem informasi yang dihadapi oleh Daerah diharapkan dapat memproses sistem informasi akuntansi dengan tepat dan terintegrasi dengan tepat dan paling sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimiliki keungan daerah untuk mengelola isu-isu tersebut, sehingga peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat terwujud. Dan yang perlu diingat bahwa setiap sistem informasi akuntansi berperan dalam efektifitas memproses kemudahan pembayaran pajak daerah. Penelitian Annisa (2017) menemukan bahwa sistem informasi berperan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.

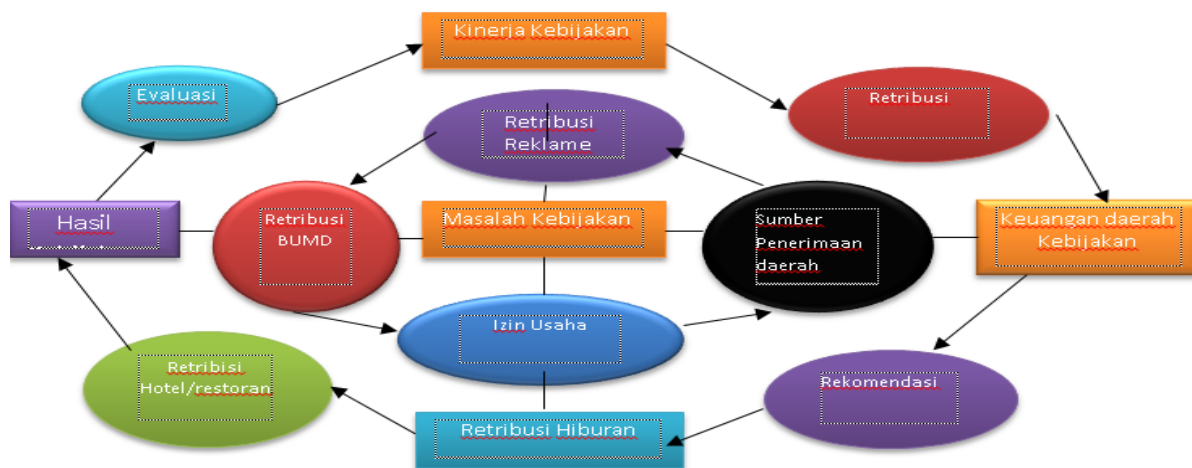
H2: Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah era pademi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Musi Banyuasin. Sampel dipilih dengan kriteria OPD yang memungut retribusi daerah. Peneliti menggunakan kriteria sampel minimal *Rule of thumb* (Hair, *et.al*, 2014), sebanyak 60 responden yang disyaratkan minimal. Responden terdiri dari 2 sub bagian yaitu sub bagian Akuntansi dan Sistem pada SKPD pemerintah daerah Musi Banyuasin.

Penelitian ini merupakan *field research* jenis observasi dimana penulis menggunakan internet kuisioner untuk mengumpulkan data. Kuisioner dirancang dengan menggunakan google form yang dikirim kepada responden melalui social media salah satunya yaitu whatsapp dan e-mail. Secara keseluruhan, proses pengumpulan data telah diambil selama 3,5 bulan dan penelitian ini tidak didanai oleh organisasi apa pun. Hasil pengolahan data terlihat tabel sebagai berikut:





Gambar 1
Model Penelitian, 2021

Definisi Operasional dan pengukuran Variabel Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Indikator-Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Sumber	Skala pengukuran
Retribusi Daerah	1.Retribusi Jasa Umum 2.Retribusi Jasa Usaha. 3.Retribusi Perizinan Tertentu	Sulistyo, (2018).	Skala Ordinal
Sistem Informasi Akuntansi	1.Information Scope, 2.Timeliness, 3.Agregation of Information	Zarkasyi (2008): Laudon, & Laudon, 2014).	Skala Ordinal
Pendapatan Keuangan Asli Daerah	1.Daya Pajak 2. Efektivitas 3.Efisiensi 4.Elastisitas	Ritonga, (2010),	Skala Ordinal

Sumber: Data Olahan (2021)

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda adalah analisis regresi yang melibatkan dua atau lebih variabel bebas.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Keuangan Asli Daerah

β_1 = Retribusi Daerah

β_2 = Sistem Informasi Akuntansi

e = Kesalahan residual (*error turn*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Dari 60 (enam puluh) kuisioner yang telah dikirim dan terisi hanya 50 (lima puluh) kuisioner dan kuisioner rusak 4 buah yang memenuhi kriteria yang dapat diolah hanya 46 (empat puluh enam) kuisioner. Kuisioner berikut menggunakan skala likert (1-5) dan dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan 2 (dua) kriteria. Kriteria-kriteria yang dimaksud antara lain adalah: bagian Akuntansi/keuangan dan bagian teknologi informasi.

Hasil Uji Outer Model

Uji Outer model terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan. Uji reliabilitas yaitu dengan melihat composite reliability dan Cronbach alpha.

Uji validitas konvergen dapat dilihat pada nilai loading faktor pada tabel 1.

Tabel 2.

Hasil Uji Loading factor

No.	Loading factor masing-masing indikator	Retribusi Daerah	Sistem Informasi Akuntansi	Pendapatan Asli Daerah	Keuangan
1.	Indikator 1	0.731	-	-	-
2.	Indikator 2	0.894	-	-	-
3.	Indikator 3	0.796	-	-	-
4.	Indikator 4	0.827	-	-	-
5.	Indikator 5	0.452	-	-	-
6.	Indikator 6	0.371	-	-	-
7.	Indikator 7	-	0.796	-	-
8.	Indikator 8	-	0.796	-	-
9.	Indikator 9	-	0.736	-	-
10.	Indikator 10	-	0.796	-	-
11.	Indikator 11	-	0.756	-	-
12.	Indikator 12	-	0.786	-	-
13.	Indikator 13	-	-	0.869	-
14.	Indikator 14	-	-	0.869	-
15.	Indikator 15	-	-	0.889	-
16.	Indikator 16	-	-	0.879	-
17.	Indikator 17	-	-	0.859	-
18.	Indikator 18	-	-	0.879	-
19.	Indikator 19	-	-	0.869	-
20.	Indikator 20	-	-	0.869	-

Sumber: Data Olahan (2021)

Hasil uji validitas konvergen menunjukkan bahwa seluruh indicator memiliki nilai diatas 0,7 yang berarti bahwa validitas baik (Hair et al, 2017). Selanjut uji validitas diskriminan dapat dilihat dari nilai *square root of AVE* yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut:



Tabel 3
Hasil Uji Square roots of AVE

No	Variabel	Square roots of AVE
1.	Retribusi Daerah	0.829
2.	Sistem Informasi Akuntansi	0.749
3.	Pendapatan Keuangan Asli Daerah	0.832

Sumber: Olah Data (2021)

Hasil AVE menunjukkan bahwa indikator yang dimiliki oleh masing-masing variabel dapat mengukur variabel yang dimaksud. *Discriminat validity* adalah membandingkan nilai *square root of average variance extracted (AVE)* setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Dimana nilai AVE harus $> 0,50$. Hasil composite reliability menunjukkan bahwa masing-masing indikator dapat mengukur variabel dengan reliable. Selanjutnya pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 4
Hasil Uji Composite Reliability

No.	Variabel	Composite reliability	Cronbach's Alpha
1.	Retribusi Daerah	0.936	0.822
2.	Sistem Informasi Akuntansi	0.920	0.836
3.	Pendapatan Asli Daerah	0.910	0.861

Sumber: Olah Data (2021)

Composite reliability blok indikator yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *internal consistency* yang dikembangkan oleh Werta, Linn, dan Joreskog dan *Cronbach's Alpha*. Dimana nilai *composite reliability* yang baik apabila nilainya $> 0,70$. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji cronbach alpha menggunakan olah Data SEM-PLS, Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha $> 0,60$. *Structural Equation Model (SEM)* dengan metode SEM-PLS, dengan menggunakan *software warp PLS 5.0*. Metode ini dicetuskan pertama kali oleh Wold sebagai metode umum untuk mengestimasi *path model* yang menggunakan konstruk laten dengan *multiple* indikator. PLS merupakan *factor indeterminacy* metode analisis yang *powerful* oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu dan jumlah sampel kecil Hal ini dirasakan sangat penting oleh responden untuk mencapai Penerimaan Retribusi Daerah, peran Sistem Informasi akuntansi dalam menaikkan Pendapatan Keuangan Asli Daerah. Namun terdapat kelemahan yang dirasakan oleh responden yaitu pada Sebelum keputusan diambil, kepala daerah mengumpulkan informasi dari SKPB dengan akurat dan lengkap sebelum mengambil keputusan yang terakomodir dengna baik sehingga Peran sistem informasi akuntansi sangat penting guna dapat mengelola Pendapatan Keuangan Asli Daerah secara tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Hasil Uji Inner Model

Hasil uji inner model terdiri dari uji goodness of fit dengan uji R square dan pengujian hipotesis dengan uji t. Tabel 4 menyajikan uji R Square

Tabel 5

Hasil Uji Goodness of fit pada inner model diukur menggunakan R square

No.	Model	R square
1	Pendapatan Keuangan Asli Daerah	0.159

Sumber: Olah data (2021)

Hasil uji R Square menunjukkan nilai 0.159 atau 15,9% yang berarti bahwa besarnya pendapatan asli daerah (PAD) dipengaruhi oleh redistribusi dan sistem informasi sebesar 15,9% dan sisanya 84.1% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian ini menentukan dengan satu variabel apakah variabel independen dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6

Hasil Pengujian Pengaruh Langsung

No.	Pengaruh Langsung	Koefisien	Signifikansi	Keterangan
1	Retribusi Daerah-Pendapatan Asli Daerah	-0.508	0.053	Ditolak
2	Sistem Informasi Akuntansi-Pendapatan Asli Daerah	0.570	0.004	Diterima

Sumber: Olah data, 2021

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis 1 memiliki nilai p value sebesar $0,053 > 0,005$ yang menunjukkan bahwa hipotesis ditolak yaitu redistribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya PAD Kabupaten Musibanyuasin dimasa Covid 19. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan nilai p value sebesar $0,004 < 0,005$ yang berarti hipotesis diterima yaitu sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap besarnya PAD Kabupaten Musibanyuasin dimasa Covid 19.

Hasil Pengujian Hipotesis 1 Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Keuangan Asli Daerah Era Pandemi Covid-19

Hasil pengujian menunjukkan bahwa redistribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya PAD Kabupaten Banyuasin di masa Pandemi Covid 19. Bencana Pandemi Covid-19 telah menyebabkan redistribusi daerah tidak dapat dikelola dengan baik akibat minimnya pendapatan perkapita masyarakat daerah. Walaupun pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan redistribusi daerah, namun di masa pandemic covid 19 pendapatan redistribusi masih belum dapat meningkatkan PAD secara signifikan. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah melakukan berbagai upaya misalnya dengan



memberikan insentif pajak. Penelitian Hertati (2015) menemukan bahwa rendahnya PAD era pademi Covid-19. menimbulkan ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat.

Hasil Pengujian Hipotesis 2 Peran Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh Terhadap Pendapatan Keuangan Asli Daerah era pademi Covid-19

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi berpengaruh signifikan dalam peningkatan PAD Kabupaten Musibanyuasin. Peranan sisten informasi akuntansi didalam perencanaan dan pelaksanaan pencatatan keuangan daerah seperti pada sistem perpajakan, dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Penelitian Harahap (2006) tentang peranan sisten informasi akuntansi keuangan dan pembangunan daerah menunjukan bahwa dalam pelaksanan sisten informasi akuntansi cukup berperan dalam pendapatan asli daerah. Didukung oleh Hertati, et al (2020) menemukan sistem informasi akuntansi dan prasarana dengan peran sistem informasi akuntansi yang dapat mengelolah data dari pengadaan sarana transportasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas, memperbaiki loket-loket pelayanan dan ruang tunggu. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan tidak berbelit-belit, prosedur penetapan tarif pajak dan retribusi daerah berhubungan secara langsung peningkatan pelayanan jasa yang diberikan (Darwanis & Bakar, 2012). Peningkatan pelayan kepada masyarakat dapat meningkatkan penerimaan dari retribusi maupun pajak daerah. Oleh sebab itu adanya sistem informasi yang mendukung dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi tidak dapat meningkatkan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Musibanyuasin dimasa pandemic Covid 19. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap besarnya pendapatan asli daerah pada kabupaten Banyuasin. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan pelayanan public sehingga berdampak terhadap peningkatan PAD kabupaten banyuasin di masa Pandemi Covid 19.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggunakan 2 variable independent serta dilakukan pada satu obyek penelitian kabuupaten Musibanyuasin. Oleh sebab itu disarankan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan variable lain serta memperluas obyek penelitian.

REFERENSI

- Abdul, A.H., Abdullah, S. (2006), Relations and agency problems in local government: An opportunity for budget research and accounting. *Government Accounting Journal*, 2(1), 53-64.
- Anggiriawan, P. B., & Kawisana, P. G. W. P. (2020). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2281.
- Annisa, V. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *JOMFekom*, 4(1), 843–857.
- Anwar, S. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. In *IOSR Journal of Economics and Finance*.
- Arens, A.A., Randal, J.E., Mark, S.B. (2014), Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach. 15th ed. England: Pearson Education, Inc.
- Arja, S. (2000), Accountability and Government Performance Measurement. *Journal of Accounting and Finance*, 12(1), 20-39.
- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51 - 61. Retrieved from <http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jrm/article/view/101>
- Boynton, W.C., Johnson, R., Kell, W.G. (2006), *Modern Auditing*. 8th ed. USA: Richard D. Irwin Inc.
- Brooks, I. (2006), *Organizational Behavior, Individuals, Groups and Organization*. 3rd ed. New York: Prentice Hall.
- Cheng, R., Engstrom, J., Kattelus, S. (2002), Education of governmental financial managers: University collaboration between business and public administration. *The Journal of Government Financial Management*, 51(3), 10-37.
- Cohen, D., Paul, Z. (2008), *Economic Consequences of Real and Accrual-Based Earnings Management Activities*. New York: New York University Leonard N. Stern School of Business.
- Christiaens, J. (1999), Financial accounting reform in Flemish municipalities: An empirical investigation. *Financial Accountability and Management*, 15(1), 21-40.
- Christiaens, J. (2001), Converging new public management reforms and diverging accounting practices in Flemish local governments. *Financial Accounta Bility and Management*, 17(2), 153-170.
- Christiaens, J. (2007), Governmental accounting reform, evolution of the implementation in Flemish municipalities. *Financial Accountability and Management*, 23(1), 99-111.



- Christiaens, J., Van Peteghem, V. (2003), Governmental account reform: Evolution of the implementation in Flemish munitions. *Financial Accountability and Management*, 23(4), 375-399.
- Darwanis, A., Bakar, U. (2012), Effect of implementation of good governance and government accounting standards on financial information quality. *Postgraduate Accounting Journal Syiah Kuala University*, 6, 1-14.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64.
- Erlangga Publisher. International Public Sector Accounting Standards Board. (2010), Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities. The International Federation of Accountants (IFAC). Available from: <http://www.ifac.org>.
- Fara, N., Soleman, R., & Hormati, A. (2018). Pengaruh Pengendalian Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 5(2), 74–89.
- Fery, I (2021). Jenis-jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah era Covid 19. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Volume 7 No 1
- Gantino, R., Hertati, L., Ilyas M. (2021). Taxpayer Compliance Model Moderated by Socialization Taxation SMEs in Indonesia. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 11, (2), 2250-3153.
- Hartanto. A. (2021). 20 Tahun Desentralisasi, Ketergantungan Pemda Terhadap Pusat Masih Tinggi. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210806/9/1426925/20-tahun-desentralisasi-ketergantungan-pemda-terhadap-pusat-masih-tinggi>.
- Hair, J.F. Jr., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., Sartet, M. (2014), *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. California: Sage Publication, Inc.
- Hall, J.A., Tomiie, S. (2005), *Information Technology Auditing and Assurance*. 2nd ed. USA: Thomson South Western.
- Harahap, S. (2006), *Critical Analysis of Financial Statements*. Jakarta: PT. Harun, H. (2009), *Sector Accounting Reform and Public Sector Management in Indonesia*. Jakarta: Jakarta Salemba Empat.
- Hasyim, B.A. (2006), The concept of good governance in the concept of regional autonomy. *Journal of Administrative and Policy Analysis*, 3(1), 1-4.
- Hertati. L (2015). Competence of Human Resources, The Benefits of Information Technology on Value of Financial Reporting in Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting* 6, (8) 12-18

- Hertati, L & Safkaur. (2020). The Influence of Information Technology Covid-19 Plague Against Financial Statements and Business Practices IJTC Iiomata International Journal of Tax & Accounting. 1 (3) 122-131
- Hertati, L., Widiyanti.M., &Desfitriana. S.A. (2020). The Effects Of Economic Crisis On Business Finance. International Journal of Economics and Financial Issues 10, (3) 236-244.
- Hertati, L., Fery, I., & Safkaur, O. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Sistem Informasi Keuangan. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 13 (1),125-136
- Hertati, L., Safkaur, O. (2020). Dampak Revolusi Industri 4.0 Era Covid-19 Pada Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Struktur Modal Perusahaan. Jurnal Riset Akuntansi Dan keuangan 8 (3), 2020, 503-518
- Indriana, I., & Nasrun, M. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Pankajene Dan Kepulauan. Equilibrium, 8(1), 19–26.
- Indra, B. (2006), Public Sector Accounting: An Introduction. Jakarta:
- Jan-Erik, L. (2000), The Public Sector Concepts, Models and Approaches. London: SAGE Publications.
- Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya, 16(1), 1–14.
- Kieso, D.E., Weygandt, Jerry, J.W., & Warfield, Terry, D.W. (2012.), Intermediate Accounting. 15th edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- KNKG. (2008), Concept of Good Public Governance Guidelines. Jakarta: Issued by: National Governance Policy Committee.
- Kusnadi. (2019). <https://infopublik.id/kategori/nusantara/372813/bpprd-musi-banyuasin-siapkan-aplikasi-e-retribusi-guna-meningkatkan-hasil-pajak-dan-retribusi?show=>
- Laudon, Kenneth K.C., & Jane P.Laudon, J.P. (2014.), Management Information System. Managing the Digital Firm. Fourteenth 14th edition. Boston: Global Edition. Pearson Pearson.
- Lundquist, K. (2001), Accrual Accounting in Swedish Central Government. Swedish: The Swedish Financial Management Authority.
- Madison, B. (2010), Defining Financial Statements. Madison: R Chad and Co Publishers.
- Mahmudi, H. (2010), Regional Financial Management. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, M. (2002), Autonomy and Regional Financial Management. 1st ed. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Mardiasmo, M. (2002), Public Sector Accounting. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Mardiasmo, M. (2006), Realization of transparency and public accountability through public



- sector accounting: A means of good governance. *Journal of Government Accounting*, 2(1), 1-17.
- Mardiasmo, M. (2007), Regional financial management reformation still faced with several difficulties. *Regional Autonomy Journal*, 7(2),1-10.
- Mulyani, S. (2021). Pandemi Covid 19 mempengaruhi Kinerja APBN. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pandemi-covid-19-mempengaruhi-kinerja-apbn-2020/>
- Nazier, D.M. (2009), Government HR Preparedness Towards Accountable and Transparent State Financial Management. Indonesia: Nationa Seminar, July 22, 2009 Organized by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia.
- Nunuy, N.A., Azwari, P.C. (2015), The effect of the implementation of government internal control systems (GICS) on the quality of financial reporting and the impact on the principles of good governance: A research in district, city, and provincial government in South Sumatra. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 211, 811-818.
- Nunuy, N.A., Rahmatika, D.N. (2014), Factors influencing the quality of financial reporting and its implications on good government. *International Journal of Business, Economics and Law*, 5(1), 111-121.
- O'Brian., James J.A &., George M. Marakas, G.M. (2010.), *Managemen Information Systems: Managing Information Technology in the Business Enterprise*. 15th edition. New York: McGraw-Hill.]
- Perkasa, R.G., Harrison, W.T., Horngren, C.T., Thomas, C.W., Suwardy, T. (2012). *Financial Accounting*. 8th ed. South Asia: Published by Pearson Education South Asia Pvte Ltd.
- Ramadhan, P. R. (2019) Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol 5 No 1.
- Raharja, M., Pratiwi, R. N., & Wachid, A. (2017). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Universitas Brawijaya, Malang, 3(1), 111–117.
- Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Buton. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 87–97.
- Rohmah, L., Noor. A., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-Jra*, 09(02), 47–57.
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43–59.
- Ritonga, I.T. (2010), *Regional Government Accounting*. Yogyakarta: UGM Graduate School.

- Robbins, S. & Judge, T.A.J. (2014), *Essensial of Organizational Behaviour*. Twelfth 12th edition. USA: Pearson Education.
- Solikin, Ikin. (2008). *He Effect of Government Accounting Implementation, Quality of Accounting Information and Quality of Regional Government Apparatus on Good Government Governance and Its Implications for Financial Performance (Survey of City and District Governments in West Java Province)* Proceedings of the National Business & and Financial Forum Seminar: 53-70.
- Stamatiadis, F. (2009), *Investigating the governmental accounting reform of the Greek national health system (ESY): Some preliminary evidence*. *International Journal of Governmental Financial Management*, 9(2), 73-97.
- Sulaiman, S. (2018), *The Role of Good Government Governance Principles in Enhancing the Performance of Public Organization in Aceh, Indonesia*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Volume 292. 1st Aceh Global Conference (AGC 2018).
- Tjokroamidjojo, B. (2000), *Good governance, new paradigm of development management*. *Journal of Development Management*, 30, 20-31.
- Van Beest, F., Braam, G., Boelens, S. (2009), *Quality of Fiancial Reporting: Measuring Qualitative Characteristics*. NICE Working Paper No. 9-108.
- Van Der Hoek, M.P. (2005), *From cash to accrual budgeting and accounting in the public sector: The Dutch experience*. *Public Budgeting and Finance*, 25(1): 32-45.
- Yamin, S., Kurniawan, H. (2011), *New Generation of Research Data Processing with Partial Least Square Path Modeling: Applications with XLSTAT Software, Smart PLS, and Visual PLS*. Jakarta: Salemba Infotek Publishers.
- Zarkasyi, W. (2008), *Good Corporate Governance in Manufacturing, Banking and Other Financial Services Business Entities*. Bandung: Alfabeta.
- Zeyn, E. (2011), *Effect of good government and government accounting standards on financial accountability*. *Trikonomika Journal*, 10(1), 52-62.

